BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahu 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga diperlukan pembangunan disegala bidang kehidupan. Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila partisipasi politik masyarakat tumbuh dan berkembang dalam suasana kehidupan yang aman dan damai.

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan Nasional tersebut, Pemerintah melakukan desentralisasi kewenangan dengan menyelenggarakan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melauli asas otonomi dan tiga pembantuan. Prinsip dari pelaksanaan otonomi daerah adalan otonomi seluas-luasnya

Dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dasar, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan daya saing daerah dan sektorunggulan disamping otonomi yang luas, juga dilaksanakan otonomi nyata dan bertanggung jawab, nyata dengan maksud menjaga kebhinekaan daerah agar berkembang dengan kekhasan masing-masing sedangkan bertanggung jawab dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi daerahbenar-benar dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya yakni : melindungi dan mensejahterakan masyarkat secara demokratis, demokratisasi dan pendidikan politik, mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelayanan masyarakat, meningkatkan pelayanan partisipasi masyarakat dan memberdayakan potensi serta keberagaman daerah.

Prinsip penting lainnya dalam penyelenggaraan otonomi tersebut adalah Pemerintah Daerah harus mampu memelihara dan menjaga

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonasia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan operasional mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi,daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat,menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan ditegaskan kembali dalam pasal 27 Undang-Undang tersebut, bahwa Kepala daerah dan Wakilnya dalammenjalan kan tugas dan wewenang wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan kewajiban daerah didalam masyarakat yang pluralistik dengan kondisi budaya masyarakat yang telah banyak mengalami perubahan dan pergeseran nilai, dalam aspek kultur maupun struktur masyarakat di tingkat makro, sehingga hubungan antar warga dan antar elit bangsa juga telah mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertikal maupun horisontal, karena sebagian dari mereka telah kehilangan jati diri bangsa yang memiliki budaya ketimuran, hal tersebut akan menimbulkan potensi rawan konflik dalam hidupbermasyarakat dan berbangsa yang dapat mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karenanya pendidikan politik bagi masyarakat perlu dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ditetapkan dalan Tap MPR-RI No.VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa yang harus dijalankan dengan konsisten dan sungguh-sungguh dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pluralistic dan dinamis juga mempunyai potensi rawan konflik dalam hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya dalam konteks aktivitas Ipoleksosbud sehingga diperluklan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokohtokoh masyarakat agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan guna tercapainya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejahtera dan berahlak, sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu lembaga teknis Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang kesatuan bangsa dan politik ke depan mempunyai tugas yang semakin berat dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi serta tantangan yang semakin kompleksn sehingga diperlukan Rencana Strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undagan, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggunggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembabfngunan Daerah,Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
22. peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daeah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 terkandung maksud sebagai berikut :

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi serta antisipasi adanya perubahan lingkungan strategis.
2. Sebagai pedoman aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
3. Sebagai dasar melakukan pengukuran kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Untuk menyesuaikan Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Perubahan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini antara lain :

1. Memberikan arah kepada aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan stake holder terkait dalam penyusunan perencanaan yang sinergis dengan pembangunan nasional dan daerah.
2. Membangun system kinerja yang akuntabel sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna meningkatkan komitmen kinerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistimatika Penulisan

Penyusunan Rencana strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi pemasalahan bedasakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan, Sasaran,

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK) KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dijabarkan dalam peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daeah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Ayat 1 adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang kesatuan bangsa,kewaspadaan nasional dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara rinci Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Sekretaris, Kepala Bidang dan Subbagian dengan tugas pokok dan fungsi yang tertuang pada pasal 62 dalam ayat 1 maka kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempuynai fungsi:

1. KEPALA BADAN:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa,Kewaspadaan Nasional, dan Politik,Ketahanan seni budaya Sosial kemasyarakatan agama dan ekonomi,merumuskan serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan kebijakan

operasional dan kebijakan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa,Kewaspadaan Nasional dan politik, ketahanan seni budaya,sosial kemasyarakatan agama dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas maka ditetapkan fungsi selaku kepala Badan sebagai berikut:

a. Menyiapkan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja badan;
b. Melaksanakan semua program dan kegiatan badan sesuai lingkup tugas;
c. Merumuskan kebijakandan petunjukteknis lingkup tugas;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaa kegiatan badan; dan
e. Meaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi denganinstansi terkait dalam pelaksanaannya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakn sebahagian tugas Kepala Badan di Bidang Kesekretariatan dengan rincian fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun Program

Dalam peynusunan program meliputi penyusunan program dan Anggaran;

b. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan.

Dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi; urusan rumah tangga,Kepegawaian,hukum dan organisasi,hubungan masyarakat.

c. Penyelenggaraan Urusan keuangan dan perlengkapan.

Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan,akutansi,verifikasi,ganti rugi,tindak lanjut LHP dan perlengkapan;

d. Membantu Menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja badan;

e. Menyusun Statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas.

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan kegiatan bidang-bidang lingkup badan; dan

g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan , berkoordinasi dengan instansi tekait dalam pelaksanaannya.

2.1 . SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup bagian umum dan kepegawaian dengan fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkup adminisrtasi umum dan kepegawaian; Mengelola admnistrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah badan, penataan, penyelenggaraan kerumah tanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.

b. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.

c. Melaporkan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian, dan

d. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaannya.

2.2. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup keuangan.

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja lingkup keuangan.

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran.

c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan pengendalian keuangan, dan menyusun laporan keuangan badan.

d. Menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, dan

e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

2.3. SUB BAGIAN PROGRAM, DAN PELAPORAN

Kepala Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian sekretaris lingkup program, dan pelaporan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas maka kepala subbagian progam dan pelaporan pempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dari bidang – bidang Badan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program badan.

c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional badan.

d. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan penilaian pengukuran kinerja badan.

e. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan.

f. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Pembangunan Daerah (LAPEM) badan.

g. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) badan, dan

h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

3. KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI,WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Kepala Bidang Bina ideologi,wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas maka kepala Bidang Bina ideologi,wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, mempunyai fungsi:

a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesabangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat pebatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;

b. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesabangpol ketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan,bela negara;

c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan komflik pemerintahan, penanganan komflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;

d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) ketahanan Ideologi Negara,wawasan

kebangsaan, bela Negara nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

e. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,(bimbingan, ipervisi,dankonsultasi,perencana-an, penelitian,pemantauan, pengembangan dan evaluasi) kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga;

f. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan,sipervisi, dan konsultasi, perencanaan,penelitian,pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

g. Pengawasan pemyelenggaraan pemerintah dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga;

h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

i. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang kewaspadaan nasional, ideologi, dan wawasan kebangsaan;

j. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan,naskah dinas dibidang tugasnya;

k. Mengumpulkan dan mengelola data di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga

kerja, penanganan konflik pemerintahan,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara,wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

l. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara,wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

m. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan,sipervisi,dankonsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga,ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

n. Melakukan pembinaan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

o. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

p. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang kewaspadaan dini kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan

q. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

3.1. SUB BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Sub Bidang bina ideologi,wawasan kebangsaan dan kewas-padaan nasional mempunyai tugas pokok untuk melaksakan sebagian tugas kepala bidang pada blingkup bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka subbagian bina ideologi,wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional mempunyai fungsi sebaga berikut :

a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan bidang ketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan,bela negara,nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,supervisi, dan konsultasi, perencanaan,penelitian,pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi negara,wawasan

kebangsaan,bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

e. Menyiapkan dan mengelola data dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

f. Menyusun rencana dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

g. Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan laporan kegiatan subbidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

3.2. SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Untuk melaksanakaan tugas pokok yang dimaksud di atas, maka kepala subbidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang Kewaspadaan dini, kerja sama intelkam,bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;

b. Pelaksanaan dan fasilitasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemeritah, penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga;

c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;

d. Pengawasan penyelenggaran pemerintah dibidang pengawasan dini, kerjasama intelkam,bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga;

e. Menyiapkan dan mengelola data kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;

f. Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dalam penyusunan laporan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga; dan

g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

4. KEPALA BIDANG BINA POLITIK

Kepala Bidang bina Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan di Bidang

Pembinaan Politik Pendidikan Politik budaya politik dan fasilitasi pemmilu.

Untuk melaksanakaan tugas pokok yang dimaksud di atas, maka kepala Bidang Bina Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (Merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang sistem dan inplementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;

b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di dibidang sistem dan inplementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;

c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dibidang sistem dan inplementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu,pilpres dan pilkada;

d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Politik, sistem dan inplementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, udaya dan pendidikan partai politik, pemilu,pilpres dan pilkada;

e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang di bidang sistem dan inplementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan partai politik, pemilu,pilpres dan pilkada;

f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan;

g. Melaksanakan kegiatan pembinaan politik dan kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibidang pemeliharaan stabilitas politik dan pengembangan demokrasi;

h. Melakukan stabilitas hubungan antara lembaga dengan DPRD

i. Mengkoordinasikan pemilihan umum,pilpres dan pilkada;

j. Melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan pembinaan di bidang pemilu serta penyusunan laporan kegiatan di sub bidang pembinaan politik dan masyarakat.

k. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang, dan

l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

4.1. KEPALA SUB BIDANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENIDIKAN POLITIK.

Sub Bidang Inplementasi Kebijakan Publik dan pendidikan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Bina Politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud tersebut diatas maka kepala Subbid Inmplementasi dan Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunya fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang sistem dan inplementasi politik,budaya dan pendidikan politik;

b. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan inplementasi politik,budaya dan pendidikan politik;

c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan (bimbingan,supervisi,dan konsultasi, perencanaan, penelitian,pemantauan, pengemba-ngan dan evaluasi) dibidang sistem inplementasi politik, budaya dan pendidikan politik;

d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Politik, sistem dan inplementasi politik,budaya dan pendidikan politik;

e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan inplementasi politik,budaya dan pendidikan politik;

f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup inplementasi kebijakan publik dan pendidikan politik; dan

g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

4.2. SUB BIDANG KELEMBAGAAN DAN FASILITASI PEMILU

Sub Bidang Kelembagaan dan fasilitasi pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup kelembagaan dan fasilitasi Pemilu.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud tersebut diatas maka kepala Subbid Kelembagaan dan fasilitasi pemilu mempunya fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang sistem dan inplementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai Politik,fasilitasi pemilu,pilpres dan pilkada;

b. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan inplementasi kelembagaan politik pemerintahan ,kelembagaan partai Politik fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;

c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,supervisi, dan konsultasi, perencanaan,penelitian,pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem inplementasi kelembagaan politik pemerintahan,kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;

d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, sistem dan inplementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;

e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan inplementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;

h. Menyusun rencana dan program kerja lingkup subidang kelembagaan dan fasilitasi Pemilu;dan

h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

5. KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI,BUDAYA ,GAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan di bidang Ketahanan Seni, Budaya,Agama,Kemasyarakatan dan Ekonomi, Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud tersebut diatas maka,kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, mempunya fungsi sebagai berikut:

Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan Seni,dan Budaya,organisasi Kemasyarakatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan,

a. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan,supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan Budaya, Agama dan kepercayaan,pembaruan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

b. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang ketahanan Seni, dan Budaya, Agama, dan kepercayaan, pembaruan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

c. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan Budaya, Agama dan kepercayaan,pembaruan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,investasi,fiskal,dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

e. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

f. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan,supervisi, dan konsultasi,

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijaksanaan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

g. Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

h. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,perdagangan lembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

i. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang; dan

j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan , berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaanya.

5.1. SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA

Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup ketahanan Seni dan Budaya

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, kepala subbidang Ketahanan seni dan budayamempunyai fungsi sebagai berikut:

Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;

a. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi, dan konsultasi,

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;

b. Pengawasan penyelenggaran pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;

c. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;

d. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang ketahanan seni budaya; dan

e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

5.2. SUB BIDANG KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKAT- AN, DAN EKONOMI

Kepala subbidang ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Identifikasi dan Analisis Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, kepala subbidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang agama dan kepercayaan,organisasi kemasyrakatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan Agama dan Kepercayaan,

organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

c. Ppengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,investasi,fiskal,dan moneter,perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

f. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

g. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

h. Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah bidang kebijakan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan

ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

i. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumberdaya alam, perdagangan, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

j. Penyusunan laporan kegiatan di subbidang ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan

k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.2.1 Sumber Daya Manusi

Sumber daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dirinci menurut jumlah pegawai, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Pejabat Struktural, dan staf Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 maka Stuktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB TANJUNG JABUNG BARAT TA.2017

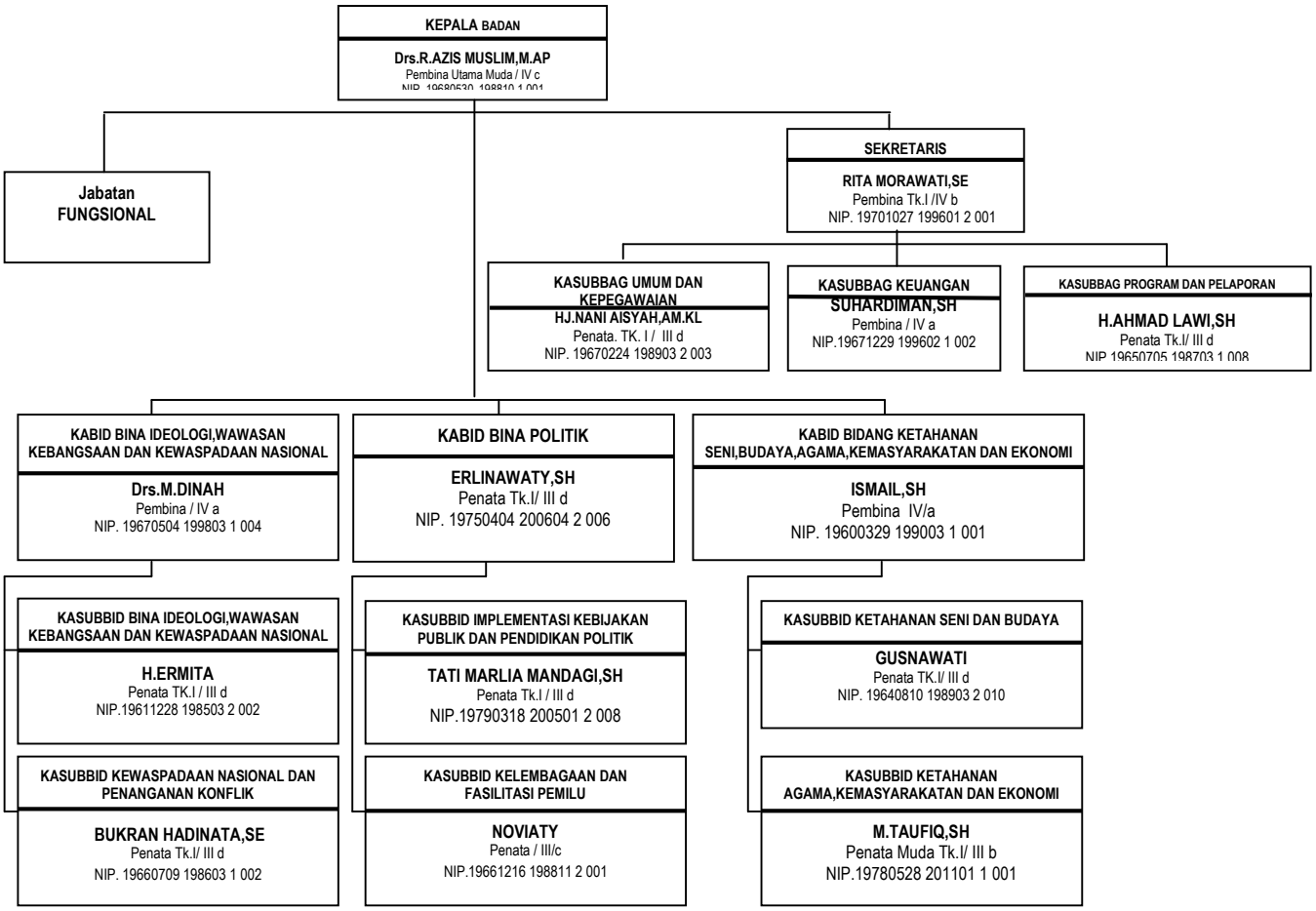

Tabel : 2.1

Data Sumber Daya Manusia

NO	GOLONGAN RUANG	PNS	TKS	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	I.a	-	-	-
2	I.b	1	-	1
3	I.c	1	-	1
4	I.d	1	-	1
5	II.a	3	-	3
6	II.b	6	-	6
7	II.c	3	-	3
8	II.d	-	-	-
9	III.a	1	-	1
10	III.b	1	-	1
11	III.c	1	-	1
12	III.d	7	-	7
13	IV.a	6	-	6
14	IV.b	1	-	1
15	IV.c	-	-	-
16	IV.d	-	-	-

17	IV.e	-	-	-
18	TKS	-	-	-
19	*)TKK	-	13	13
	Jumlah	32 Orang	13 Orang	45 Orang

*) TKK. Petugas Administrasi = 10 orang
TKK. Penjaga Kantor = 2 orang
TKK. Petugas Kebersihan = 1 orang

2.2.2. Sumber Daya Aset

ntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel. 2.2
Sarana Perlengkapan Pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH
1	Kendaraan Roda 4 (empat)	3 Buah
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	14 Buah
3	Mesin Speed Boat	1 Buah
4	Meja 1 Biro	1 Buah
5	Meja Kerja Letter L	1 Buah
6	Meja 1/2 Biro	41 Buah
7	Kursi Kerja 1/2 Biro	1 Buah
8	Kursi Putar	2 Buah
9	Kursi Putar Sandaran Pendek	4 Buah
10	Kursi Stainless polos	20 Buah
11	Kursi Lipat	8 Buah
12	Kursi Tamu Letter L	1Buah
13	Kursi Standar	6 Buah
14	Kursi plastik	15 Buah
15	Kursi Kayu	1 Buah
16	Meja Komputer 1/4 Biro	2 Buah
17	Meja Panjang	1 Buah
18	Helm	40 Buah

19	Lemari 2 pintu	1 Buah
20	Lemari Arsip	2 Buah
21	Meja Komputer	1 Buah
22	Gordeng Jendela	2 Buah
23	Dispenser	1 Buah
24	Gmb Presiden/ Wapres	1 Buah
25	Handy Cam	1 Buah
26	Lambang Negara	1 Buah
27	Bendera	4 Buah
28	Wireless	1 Buah
29	Mesin Penyedot air	3 Buah
30	Faximile/ Laser Multifungtions	1 Buah
31	Televisi 21 Inc	2 Buah
32	Genset	4 Buah
33	Tangga Almunium	1 Buah
34	Megaphone (Pengeras Suara)	2 Buah
35	AC	4 Buah
36	Kipas Angin Gantung	7 Buah
37	Papan Data Besar	4 Buah
38	OHV	1 Buah
40	Jam Dinding	2 Buah
41	Mesin Tik Standar	2 Buah
42	Filling Kabinet	5 Buah
43	Brankas	2 Buah
44	Lemari Arsip Untuk Dinas	3 Buah
45	Lemari Arsip 2 Pintu Untuk Dinas	2 Buah
46	Komputer / PC Unit	6 Buah
47	Laptop	5 Buah
48	Infocus	1 Buah
49	Printer	5 Buah
50	UPS	1 Buah
51	Pesawat Telepon/ Fax	1 Buah
53	Repiter Radio Pancar	1 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara lengkap tercermin dari hasil pelaksanaan program

kegiatan selama kurun waktu 5 tahun (2011-2015). Adapun capaian kinerja pelaksanaan tiap program / kegiatan sebagaimana terlampir. Sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel. T-C 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indokator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor dengan lancar				100%	100%	100%	100%	100%	93%	97%	90%	84%	44%	92.91	97.08	90.10	83.84	43.96
2	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor				100%	100%	100%	100%	100%	97%	96%	98%	93%	34%	96.60	96.22	98.49	92.53	33.84
3	Meningkatnya disiplin aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	73%	82%	0%	99.16	99.16	73.11	81.61	0

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indokator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS				100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	77%	99%	2.5%	99.16	99.16	77.50	98.80	2.5
5	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan				100%	100%	100%	100%	100%	94%	99%	91%	15%	20%	93.81	98.74	91.23	14.61	20.26
6	Berkembangnya wawasan kebangsaan				100%	100%	100%	100%	100%	98%	97%	97%	52%	22%	97.85	96.93	96.12	52.11	22.34
7	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa				100%	100%	100%	100%	100%	50.67	97%	99%	83%	76%	50.67	97.36	99.92	82.82	76.46

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indokator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Meningkatnya simulasi pembauran kebangsaan di daerah				100%	100%	100%	100%	100%	69%	95%	94%	62%	23%	69.07	95.47	94.50	62.28	23.08
9	Terpeliharanya Kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal				100%	100%	100%	100%	100%	94%	96%	85%	70%	44%	93.86	95.93	84.58	69.96	44.15
10	Terciptanya masyarakat yang berpendidikan politk				100%	100%	100%	100%	100%	94%	90%	77%	85%	46%	93.80	89.61	76.78	84.84	46.36

Tabel T.C.2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	3	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	621,315,682	845,012,500	964,894,325	432,771,000	531,458,800	577,263,990	820,361,232	869,343,744	362,834,180	169,776,000	92.91	97.08	90.10	83.84	43.96	679,090,461	559,915,829
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	217,777,500	616,110,000	773,638,594	793,136,000	743,305,000	210,368,000	592,812,700	761,937,350	733,860,760	112,069,500	96.60	96.22	98.49	92.53	33.84	628,793,419	482,209,662
Program Peningkatan disiplin aparatur	64,800,000	64,800,000	116,300,000	15,225,000	12,750,000	64,258,000	64,258,000	85,030,000	12,425,000	0	99.16	99.16	73.11	81.61	0	54,775,000	45,194,200

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	3	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penginkatan kapasitas sumber daya aparatur	64,800,000	64,800,000	60,000,000	50,000,000	60,000,000	64,258,000	64,258,000	46,500,000	49,400,000	1,500,000	99.16	99.16	77.50	98.80	2.5	59,920,000	45,183,200
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	59,790,200	-	-	-	-	50,171,000	-	-	-	-	83.91	-	-	11,958,040	10,034,200
Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	591,152,060	785,620,770	1,123,300,370	828,345,000	794,890,000	554,538,560	775,713,770	1,024,751,810	121,050,600	81,324,800	93.81	98.74	91.23	14.61	20.26	824,661,640	511,475,908
Program Peningkatan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	488,341,300	730,510,200	750,482,600	502,116,000	441,912,000	458,375,200	700,760,700	634,771,800	351,255,900	190,465,095	93.86	95.93	84.58	69.96	44.15	582,672,420	467,125,739

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	3	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pendidikan Politik Masyarakat	**75,973,600**	**117,158,800**	**457,996,600**	**638,596,500**	**1,502,793,900**	**71,263,600**	**104,990,300**	**351,646,100**	**541,796,825**	**348,552,350**	**93.80**	**89.61**	**76.78**	**84.84**	**46.36**	**558,503,880**	**283,649,835**
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	**70,959,500**	**697,599,400**	**73,916,500**	**313,627,500**	**102,157,000**	**35,955,500**	**679,152,400**	**73,854,000**	**259,748,600**	**78,113,600**	**50.67**	**97.36**	**99.92**	**82.82**	**76.46**	**251,651,980**	**225,364,820**
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	**198,397,500**	**277,678,500**	**497,614,700**	**625,877,600**	**442,017,000**	**194,128,900**	**269,153,000**	**478,306,700**	**326,141,400**	**102,712,300**	**97.85**	**96.93**	**96.12**	**52.11**	**22.34**	**408,317,060**	**274,088,460**

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	3	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan sumber daya masnusia dalam memasyaraktkan dan menyebarluaskan bela negara	-	-	-	-	89,067,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,813,400	0
Program embauran Kebangsaan	85,325,500	232,543,500	224,269,800	228,411,500	186,735,000	58,930,500	222,013,500	211,933,300	142,255,500	43,104,300	69.07	95.47	94.50	62.28	23.08	191,457,060	135,647,420
Ketahanan Ekonomi	-	-	-	-	102,625,000	-	-	-	-	23,228,000	-	-	-	22.63	22.63	20,525,000	4,645,600

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	3	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban	**141,110,500**	**368,934,000**	-	-	-	**139,678,500**	**119,981,000**	-	-	-	**98.99**	**32.52**	-	-	-	**102,008,900**	**51,931,900**

bel: 2.5

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap Sasaaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara maksimal.
2. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum Sesuai (Job description).
3. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi IT.yang tersedia.
4. Peran Badang Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat kurang dikenal masyarakat.
5. Penempatan PNS (mutasi/promosi) yang tidak sesuai dengan kemampuan (skil) dan keahliannya dan menjadi kendala pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
6. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
7. Potensi terjadinya konflik di masyarakat (horizontal,vertical dan SARA).
9. Kurangnya kesadaran masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perorangan dalam memanfaatkan jalur musyawarah atau hukum dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sehingga seringkali menempuh melalui media demo/unjuk rasa yang memungkinkan terjadinya tindakan anarkis.
10. Adanya koordinasi yang baik dijajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

11. Adanya benktuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

12. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

13. Partisipasi Parpol, ormas/LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh agama/Tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dalam kehidupan berdemokrasi.

Pada Umumnya kualitas penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsadan Politik di Kabupaten Tanjug Jabung Barat selama lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa Indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya berbagai unsur pendidikan demokrasi melalui kegiatan sosialisasi kunjungan kerja pemantauan pelaksanaan pemilu presiden, legislativ, dan pemilu kada

2. Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan dan memperkuat nilai – nilai luhur

3. Meningkatnya pencegahan tindak kriminal

4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pemantauan ekstensi kominda

5. Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat

6. Meminimalisasi konflik pemeritahan dan konflik sosial antar warga masyarakat di daerah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan diklat fungsional

3.1.2. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (oppurtunities)

a. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Partisipasi parpol, ormas/LSM, Perguruan Tinggi,Toga/Tomas dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

2. Ancaman (treaths)

a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

b. Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS

c. Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat (horizontal, vertical dan SARA)

d. Kurangnya kesadaran masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perorangan dalam memanfaatkan jalur musyawarah atas hokum dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sehingga seringkali menempuh melalui media demo/unjuk rasa yang kadangkala berujung pada anarkisme.

Tabel T-B.35

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Aspek Kajian	**Capaian /Kondisi Saat ini**	**Standar yang digunakan**	**Faktor yang mempengaruhi**		**Permasalahan Pelayanan SKPD**
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	60 %		Pembentukan Komonitas Intelijen Daerah (Kominda)	Aparat Intelijen diluar Badan Kesbanpol	Kurangnya Anggaran Operasional
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	60 %		Pembentukan Tim FKUB	Anggota FKUB diluar Badan Kesbangpol	Kurangnya Koordinasi antar anggota FKUB
Pendidikan Politik	60 %		Sumber Daya Manusia Badan Kesbanpol	Peran aktif Parpol Peran aktif LSM	Kurangnya koordinasi Parpol,LSM dengan

Masyarakat					Petugas Kesbangpol
Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Memasyarakatkan dan Menyebarluaskan Bela Negara	60 %		Peranaktif SDM Kesbanpol	Aparat Camat Aparat Pemdes Mahasiswa Masyarakat	Kurangnya Anggaran Pelaksanaan Kegitan Bintek Bela Negara
Pembauran Kebangsaan	60 %		Peranaktif SDM Kesbanpol dan Tim Forum Pembauran Kebangsaan	Tokoh Tokoh Adat Daerah Masyarakat Adat	Kurangmya Komonikasi antar Tokoh Adat,Masyarakat Adat dan Badan Kesbanpol
Ketahanan Eekonomi	60		- Penunjukan Nara Sumber yang kurang memahami Ekonomi	- SKPD yang membidangi tupoksi bidang Ekonomi Ketersediaan Anggaran	Kurangnya Koordinasi dengan SKPD yang membidangi tupoksi Ekonomi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Era otonimi daerah seperti sekarang ini, peluang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kewenagan, kebebasan dan kemandirian yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diharapkan mampu merancang program pembangunan yang benar-benar kontestual, memiliki akuntabilitas public, mampu mengembangkan layanan yang benar-benar berorientasi kepada kebutuhan public serta mampu bekerja secara efisien, bersih, transparan dan didukung aparatur birokrasi yang professional, beretika, peka serta berpihak kepada rakyat.

Dengan memahami apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016-2021 telah ditetapkan VISI dan Misi Pembangunan Daerah, oleh Bupati dan Wakil Bupati tepilih. Visi, Visi merupakan suatu cita cita pembangunan yang ingin dicapai lima tahun kedepan, adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati tepilih. Adalah :

= q b o t r g r a k v ^ = h ^ _ r m ^ q b k = q ^ k g r k d = g ^ _ r

j ^ g r I = ^ a f i I = j ^ h j r o I = _ b o j ^ o q ^ _ ^ q I = a ^ k = _

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

ADIL berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang

pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkupan hidup.

Untuk mencapai Visi yang dimaksud di atas maka harus di jalankan beberapa Misi, adapun Misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

MISI KEPALA DAERAH

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari keempat misi tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya sebagai perencana pembangunan kabupaten dibidang Kesatuan

Bangsa dan Politik, maka akan meberikan dukungan program melalui Misi yang ke Empat yaitu :

j £ ¬ § ¬ ¥ © ~ ² © ~ ¬ = ® £ ° ± ~ ²~³¬~¥¬«±£~ ª¢~~ ª¬ ³=§ © £ ¦±~~ °² «³ -~¬¬§ ±

© £ ¦ § ¢ ³ £® ~~¬¥ ~ « ~ = ¢ ~ ¬ = £ ° ³ ¢ ~ · ~ I = ± ³ ® ° £ « ~ ± §

® £ « £ ° § ¬ ² ~ ¦ ~ ¬ = · ~ ¬ ¥ = ~ § © K

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka dilakukan kajian dan analisa untuk menetapkan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Substansi dari visi, misi dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan khususnya memperluas pendidikan politik dan meningkatkan serta mengoptimalkan masyarakat dalam hidup berbangsa dan berbudaya serta beragama pemberdayaan kegiatan Ketahanan ekonomi Masyarakat yang nyata dan berpihak pada rakyat/Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan tujuan utama atau program prioritas yang akan dicapai Pemerintah Daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan transparansi di era Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan, kebebasan dan kemandirian dalam melakukan kebijakan dan program pembangunan melalui ketetapan visi, misi dan program prioritas sesungguhnya telah memiliki akses politik yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi,misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Misi :

j £ ¬¥§©¬~ ² © ~ ¬ = ® £ ° ± ~ ² ³ ~¬¥ ©§£ ¦ ~ ² ³ « ¬ ¬ § ±

© £ ¦ § ¢ ³ ® ~ ¬ = £ ° ~ ¥ ~ « ~ = ¢ ~ ¬ = £ ° ³ ¢ ~ · ~ I =

© £ ª - ª ~ = ® £ « £ ° § ¬ ² ~ ¦ ~ ¬ = · ~ ¬ ¥ = ~ § © K

Tujuan:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

Sasaran:

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesbilitas dan daya saing daerah.
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.

3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
5. Peningkatan kepustakaan daerah.
6. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.

23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-Government dan e-Budgeting
34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1. Faktor-faktor Penghambat

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri maka Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi dari 33 Provensi yang ada dan berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesi. Sebagai sebuah provinsi harus melakukan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Bupati dan Walil Bupati terpilih dalam

TABEL 3.3
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN SASARAN RENSTRA K/L
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No.	Sasaran jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Terwujudnya situasi Politik Daerah yang kondusif	Kurangnya Pengawasan secara terus menerus/berkesinambungan	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan prilaku berdemokrasi.	Tupoksi Kesbangpol
	Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis	Sosialisasi tentang kedemokrasian yang kurang	Ketersediaan Anggaran	Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik.
	Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah	Kurangnya pemahaman kedemokrasian kelembagaan	Ketersediaan Anggaran	Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan

				kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kebangsaan.
	Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyareakat	Kurangnya sosialisasi untuk mencapai situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyareakat secara optimal	- Masih sporadisnya konflik social (seperti : perburuhan, tani, nelayan, dll) yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat. - Ketersediaan Anggaran	-Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik. - Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penegakan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran
Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong keberhasilan penanganan

No.	Sasaran jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Terwujudnya situasi Politik Daerah yang kondusif	Kurangnya Pengawasan secara terus menerus/berkesinambungan	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan prilaku berdemokrasi.	Tupoksi Kesbangpol
	Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis	Sosialisasi tentang kedemokrasian yang kurang	Ketersediaan Anggaran	Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik.
	Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi	Kurangnya pemahaman kedemokrasian kelembagaan	Ketersediaan Anggaran	Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam

	dalam pembangunan daerah			upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kebangsaan.
	Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyareakat	Kurangnya sosialisasi untuk mencapai situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyareakat secara optimal	- Masih sporadisnya konflik social (seperti : perburuhan, tani, nelayan, dll) yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat. - Ketersediaan Anggaran	-Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik. - Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penegakan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013 – 20133, memiliki Tujuan,Kebijakan dan Strategi.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat;

(a). perdagangan dan jasa

(b). Pertanian,perikanan,dan

(d). pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Kebijakannya adalah Kebijakan Penataan Ruangan adalah untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti:

(a). Perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi terselenggaranya kesenjanan antar wilayah ;

(b). Pemantapan system perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sector perdangan dan Jasa.

(c). Perwujudaan system perekotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;

(d). Perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;

(e). Pengembangan dan pemanfatan potensi perikanan secara opmal;

(f). Perwujudan dan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;

(g). Perwujudan system jaringan prasarana seluruh wilaayah Kabupaten;

(h). Peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan ;

(i). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan

(j). Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Startegi penataan ruang adalah sebagai berikut;

(a). Strategi perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah.

(b) Strategi pemantapan system perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sector perdagangan dan jasa;

(c) Strategi perwujudan system perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;

(d). Strategi perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;

(e). Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi peerikanan secara optimal;

(f). Strategi Peningkatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagai sector penggerak perekonomian wilayah;

(g). Strategi perwujudan system jaringan prassarana seluruh wilayah kabupaten;

(h). Strategi peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang bewawasan lingkungan;

(i). Strategi peningkatan kuwalitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan

(j). Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KHLS
beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Hasil KHLS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Reformasi Nasional yang beresensi demokratisasi tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa telah membawa kehidupan segnifikan, utamanya dalam perubahan paradikma pemerintahan yaitu dari pola sentralisasi bergeser ke pola desenrtalisasi yang berimplikasi pula pada perubahan peran kementrian dalam negeri yang harus makin responsive terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis.

Perubahan dasar dibidang politik dan pemerintahan tersebut disamping memberikan harapan secara faktual juga akan menimbulkan akses dibidang politik, ekonomi, social dan budaya yang harus diantisipasi dengan kinerja pemerintahan yang baik (Good Govermance) yang mampu mengatasi permasalahan actual bangsa, sehingga hubungan antar warga, antar elit politik dan anta relit bangsa juga akan mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertical maupun horizontal karena sebagian dari mereka telah kehilangan jati diri bangsa yang memiliki budaya ketimuran. Hal tersebut akan menimbulkan potensi rawan konplik dalam hudup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang akhirnya dapat mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

Untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program kegiatan pembangunan yang dirumuskan Tahun 2016 – 2021, salah satu langkah antisipatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi usi-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Kabupaten Tajung Jabung Barat pada masa 5 (lima) tahun kedepan, antara lain :

a. Konflik politik pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presidan dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah.
b. Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradap dapat menghambat proses demokratisasi.

c. Merosotnya kredibilatas pemerintahan dan peneggakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirami massa/sosial.
d. Mengejalanya erosi Nasonalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
e. Euforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecendrungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan prilaku berdemokrasi.

Oleh karenanya pendidikan politik, wawasan kebangsaan, demokratisasi, penegakan hukum/HAM dan kerukunan hidup dalam aspek IPOLEKSOSBUD perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui forumkomunikasi, forum fasilitasi, forum silaturrahmi rapat koordinasi terpadu dan lain-lain berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat/agama agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransisolidaritas social dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan guna tercapainya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang adil, sejahtera dan beraklak sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam wilayah NKRI.

Tabel 3.7

Skor Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	10
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	20
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
	Total	100

Tabel 3.8

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Konflik politik pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presidan dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah.	20	20	10	-	20	20	90
2	Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradap dapat menghambat proses demokratisasi	-	20	10	10	20	20	80
3	Merosotnya kredibilatas pemerintahan dan peneggakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirami massa/sosial.	20	-	10	10	20	20	80
4	Mengejalanya erosi Nasonalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	20	20	10		20	20	90
5	Euforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecendrungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan prilaku berdemokrasi.	20		10		20	-	50

Tabel : 3.9
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	ISU-ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA – RATA SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Konflik politik pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presidan dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah.	90	90/5 = 18
2	Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradap dapat menghambat proses demokratisasi	80	80/5 = 16
3	Merosotnya kredibilatas pemerintahan dan peneggakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirami massa/sosial.	80	80/5 = 16
4	Mengejalanya erosi Nasonalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	90	90/5 = 18
5	Euforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecendrungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan prilaku berdemokrasi.	50	50/3 = 17

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan.

Tujuan yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Visi dan Misi tersebut adalah tercapainya sasaran dan program secara efektif dan efisien.

Uuntuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka upaya pencapaian tujuan dimaksud akan tercermin dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Sejalan dengan misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam RPJMD 2016-2021, sebagai berikut :

Tujuan ke 1:

Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya;

Sasaran:

Meningkatkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Tatanan Masyarakat yang beragama dan Berbudaya

Yangdi turunkan dalam Tingkat OPD dengan dengan Tujuan,Sasaran, Indikator Sasaran sebagaimanatabel berikut :

TABEL T-C.23
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA ENENGAH
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE				
				I	II	III	IV	V
1			1. Indeks Kepuasan Masyarakat					
		Sasaran 5 MeningkatnyaKualitaspelayananPublikdanakuntabilitaskinerjadanKeuangan	2. Nilai AKIP					
			Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang di tindak lanjuti					
		Sasaran 1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban umumserta keharmonisan dan kwalitas kehidupan osial masyarakat baik antar suku agama dan golongan	1. Persentase penurunan konflik social					

			2. Persentase penurunan aksi unjuk rasa					
		Sasaran 2 Meningkatnyapemahamanmasyarakat terhadap idiologi bangsa, wawasankebangsaan dan Bela Negara	1.Tingkatkeberhasilanpencapaianpertumbuhan / perkembangankelompokradikal					
			2. Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kasus yang berlatar belakang sukuras dan antargolongan					
		Sasaran 3 Meningkatnyakwalitaskehidupansosialsertapemberdayaan Ormasgunaterpeliharanyakehidupanmasyarakat yang kodusif	1. Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan konflik terkait kerukunanan antar kerukunan					

			umatberagama					
			2. Persentase Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan					
		Sasaran 4 Meningkatkan demokrasi yang sehat dan partisipasi politik kmasyarakatan	1.Prosentasepartisipasima syarakat dalampemilu: - Pilpres 2019 - Pileg Provinsi dan Kabupaten - Pileg DPD					
			2.Persentase penurunan sengketa pemilu					
			3.IndeksDemokrasi Indonesia (Tanjaabbar)					

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Stategi pembangunan tersebut dijalankan dengan mengacu pada Visi ***"Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju,Adil,Makmur,Bertabat,dan Berkualitas"***. dalarn rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peranan didalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Salah satu dimensi yang berhubungan dengan Badan Kesbangpol yaitu menguatkan jati diri masyarakat berdasarkan kebudayaan dengan memberdayakan lembaga lembaga kemasyarakatan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Adapun Straregi yang berkenaan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan jangka menengah Daerah periode 2016-2021 dan diperioritaskan untuk mendukung Misi ke empat adalah sebagai berikut:

Strategi pada Tujuan 1 adalah :

Peningkatan peran serta masyarakat dalam keharmonisan beragama

5.2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai target indikator kinerja dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan strategi, maka diperlukan adanya arah kebijakan sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan daerah periode 2016-2021 yang berkenaan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupatean Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel T.VI.C.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Misi : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1. Meningkatknya kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam keharmonisan beragama	- Mengikutsertak an tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agam	- Mengikutsertak an tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama	- Mengikutsertak an tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama	- Mengikutsertak an tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama	- Mengikutsertak an tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama	- Mengikutsertak an tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembanguan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut maka dialokasikan dana yang merupakan pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Sebagaimana telah di sajikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah melalui Renstra Perubahan 2016-2021 mempunyai 3 (tiga) parogram prioritas dan 5 program Rutinitas sebagai penunjang. Hal ini dapat dilihat pada tabel

Tabael TC 27
RENSTRA PERUBAHAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator: Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Indikator Sasaran 1 1. Persentase penurunan . konflik social 2. Persentase penurunan . aksiu njuk rasa	**100%**	**90%**	**85,000,000**	**92%**	**145,000,000**	**93%**	**195,000,000**	**94%**	**220,000,000**	**95%**	**220,000,000**	**96%**	**231,000,000**	**100%**	**1,096,000,000**	**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat
	SASARAN 1 Meningkatnya keamanandan ketertibanumumsertakeharmonisandankwalitaskehidupan sosialmasyarakatbaikantarsuku agama dangolongan		**PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT /PEKAT**	**Indikator Sasaran Program 1** '- Persentase realisasi Rencana Aksi Tim ter padu Penanganan konflik sosial. '- Persentase Desa / Kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan peningkatan konflik sosial. '- Jumlah Kecamatan yang termonitor keberadaan kegiatan orang asing di daerah. '- Persentase cegah dini dan advokasi Rencana Aksi unjuk Rasa																	Tanjung Jabung Barat
				Indikator Kinerja Kegiata '- Persentase pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu penangaan konflik yang disampaikan tepat waktu. '- Persentase penurunan konflik sosial yang terjadi '- Jumlah unjuk Rasa yang terkendali. Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pencegahan dan penyalahgunaan Napza. '- Persentase penurunan permasalahan akibat		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100 %**		**100 %**		**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat

		keberadaan Lembaga / orang Asing. '- Persentase lembaga / orang asing yang keberadaannya yang terawasi																
	Tim Kewaspadaan Dini di Daerah (FKDM)	- Persentase Kinerja Tim Kewaspadaan dini Daerah dalm Temu Cepat Lapor	85%	2 Dokmen	85,000,000	2 Dokmen	100,000,000	2 Dokumen 1 Kampung Pancasila	150,000,000	2 Dokumen 1 Kampung Pancasila	175,000,000	2 Dokumen 1 Kampung Pancasila	175,000,000	2 Dokumen 1 Kampung Pancasila	183,750,000	2 Dokumen 1 Kampung Pancasila	868,750,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba	Jumlah pelaksanaan serta Peserta Sosialisasi pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA	0.00%	0.00%	0	50 Orang	45,000,000	50 Orang	45,000,000	50 Orang	45,000,000	50 Orang	45,000,000	50 Orang	47,250,000	80%	227,250,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Indikator Sasaran 1 1. Persentase penurunan konflik social 2. Perosentase penurunan aksi unjuk rasa	**88%**	**90%**	**297,130,000**	**91%**	**635,000,000**	**92%**	**775,000,000**	**93%**	**775,000,000**	**94%**	**1,025,000,000**	**95%**	**1,348,750,000**	**95%**	**4,855,880,000**	**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat
		Indikator Sasaran Program 1 '- Persentase realisasi Rencana Aksi Tim ter padu Penanganan konflik sosial. '- Persentase Desa / Kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan peningkatan konflik sosial. '- Jumlah Kecamatan yang termonitor keberadaan kegiatan orang asing di daerah. '- Persentase cegah dini dan advokasi Rencana Aksi unjuk Rasa																	Tanjung Jabung Barat

				Indikator Kinerja Kegiatan '- Persentase pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu penangaan konflik yang disampaikan tepat waktu. '- Persentase penurunan konflik sosial yang terjadi '- Jumlah unjuk Rasa yang terkendali. Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pencegahan dan penyalahgunaan Napza. '- Persentase penurunan permasalahan akibat keberadaan Lembaga / orang Asing. '- Persentase lembaga / orang asing yang keberadaannya yang terawasi																	Tanjung Jabung Barat
			Koordinasi Kegiatan Orang Asing LSM Asing dan lembaga asing di Daerah (NGO)	- Persentase penurunan permasalahan akibat keberadaan Lembaga / orang Asing. - Persentase Lembaga / orang asing yang keberadaannya yang terawasi	84,13%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	100,000,000	8 Dokumen	200,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
				- Persentase Lembaga / orang asing yang keberadaannya yang terawasi																	Tanjung Jabung Barat
			Penanganan Konflik Sosial (PKS)	Persentase pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu penangaan konflik yang disampaikan tepat waktu.	80%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000	8Dokumen	300,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
				Persentase penurunan konflik sosial yang terjadi																	Tanjung Jabung Barat
																					Tanjung Jabung Barat
	SASARAN 2 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideology bangsa, wawasan kebangsaan dan bela		**PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**	**Indikator Sasaran ke 2** 1.Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kelompok radikal 2.Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kasus yang berlatar belakang sukuras dan antargolongan																	Tanjung Jabung Barat

	negara			**Indkator Sasaran Program 2** - Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinanaan antara Kerukunan Ummat Bergama - Jumlah Ormas yang mendaftarkan keberadaannya ke Badan Kesbangpol TJB. - Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan Ideologi bangsa dan bela Negara. - Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan terhadap tokoh masyarakat,tokoh Agama, dan tokoh Pemuda sebagai kader pembauran Kebangsaan.																	Tanjung Jabung Barat
				INDIKATOR KINERJA KEGIATAN '- Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti sosialisai / Forum Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan - Tingkat pemahaman peserta terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan. - Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti Pemantapan Idiologi Bangsa dan Bela Negara.																	Tanjung Jabung Barat
			Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	Tingkat pemahaman peserta terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan.	0.00%	50 Orang	35,000,000	50 Orang	35,000,000	50 Orang	75,000,000.00	50 Orang	75,000,000.00	50 Orang	75,000,000.00	50 Orang	78,750,000	12 Bulan	373,750,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti sosialisai / Forum Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	90%	13 Kecamatan	81,630,000	60 Orang	200,000,000	60 Orang, 1 Percontohan Kampung Pancasila	200,000,000	60 Orang 1 Percontohan Kampung Pancasila	200,000,000	60 Orang 1 Percontohan kampung Pancasila	200,000,000	60 Orang 1 Percontohan kampung Pancasila	200,000,000	300 Orang	1,081,630,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Bimtek Bela Negara	Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti Pemantapan Idiologi bangsa dan bela Negara.	0.00%					40 Oramg	100,000,000	40 Oramg	100,000,000	40 Oramg	100,000,000	160 Oramg	400,000,000	280 Orang	700,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
				Tingkat pemahaman Peserta terhadap Idiologi bangsa dan bela negara																	Tanjung Jabung Barat

																			Tanjung Jabung Barat
			Indikator Sasaran 3 1. Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan konflik terkait Kerukunanan umat beragama 2. Persentase Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan																Tanjung Jabung Barat
	SASARAN 3 Meningkatnya kwalitas kehidupan sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kodusif	**PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**	**Indikator Sasaran Program** Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinanaan antara Kerukunan Ummat Bergama - Jumlah Ormas yang mendaftarkan keberadaannya ke Badan Kesbangpol TJB. - Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan Ideologi bangsa dan bela Negara. - Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan terhadap tokoh masyarakat,Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda sebagai kader pembauran Kebangsaan																Tanjung Jabung Barat
			Indikator Kinerja Kegiatan '- Jumlah Peserta dialog Kerukunan Ummat anatar Beragama - Jumlah Ormas yang mengikuti pembinaan oleh Badan Kesbangpol.																Tanjung Jabung Barat
		Pembinaan Ummat Beragama dalam rangka menciptakan Keharmonisan antar Ummat dan Toleransi Kerukunan Ummat Beragama (FKUB)	Jumlah Peserta dialog Kerukunan Ummat anatar Beragama	99,38%	12 Bulan	118,000,000	2 Kali Rapat di Kabupaten dan 1 kali rapat di tiap Kecamatan (13 Kecamatan)	150,000,000	2 Kali Rapat di Kabupaten dan 1 kali rapat di tiap Kecamatan (12 Kecamatan) 1 Percontohan Kampung KUB	150,000,000	2 Kali Rapat di Kabupaten dan 1 kali rapat di tiap Kecamatan (12 Kecamatan) 1 Percontohan Kampung KUB	150,000,000	2 Kali Rapat di Kabupaten dan 1 kali rapat di tiap Kecamatan (12 Kecamatan) 1 Percontohan Kampung	150,000,000	100 %	157,500,000	12 Bulan	875,500,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat

													KUB						
			Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM	Jumlah Ormas yang mengikuti pembinaan oleh Badan Kesbangpol.	100%	100 Orang	48,000,000	60 Ormas	125,000,000	60 Ormas	125,000,000	60 Ormas	125,000,000	60 Ormas	125,000,000	60 Ormas	131,250,000	12 Bulan	679,250,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Orientasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti Pemantapan Idiologi Bangsa dan Bela Negara.	87%	40 Orang	14,500,000	60 Orang	125,000,000	60 Orang	125,000,000	60 Orang	125,000,000	60 Orang	125,000,000	60 Orang	131,250,000	12 Bulan	645,750,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
																			Tanjung Jabung Barat
	SASARAN 4 Meningkatkan demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat		**PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**	**Indikator Sasaran 4** 1.Persentase partisifasi masyarakat dalam pemilu : - Pilpres 2019 - PilegProvinsidanKabupaten - Pileg DPD 2.Persentase penurunan Jumlah ' sengketa pemilu 3.IndeksDemokrasi Indonesia (Tanjaabbar)	**88%**	**90%**	**130,000,000**	**90%**	**863,000,000**	**93%**	**895,000,000**	**94%**	**400,000,000**	**95%**	**810,000,000**	**96%**	**934,500,000**	**100 %**	**4,032,500,000**	**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat
				Indikator Sasaran Program Persentase partisipasi masayarakat dalam Pemilu : - Pilpres - Pileg Pusat, - Pileg Provisi - Pileg Kabupaten - Pileg DPD - Legitimasi (Keabsahan) hasil ' Pemilu																	Tanjung Jabung Barat
				Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya monitoring,Evaluasi dan pelaporan Pra dan Pasca Pileg dan Pilpres 2019 di Kab Tanjung Jabung Barat	100%	0.00%	0	4 Kali 4 Dokumen	345,000,000	4 Kali 4 Dokumen	345,000,000	4 Kali 4 Dokumen	200,000,000	4 Kali 4 Dokumen	200,000,000	4 Kali 4 Dokumen	210,000,000	4 Kali 4 Dokumen	1,300,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Monitoring Evaluasi dam Pelaporan Pelaksanaan Pemilu	Persentae Golput dalam Pemilu 2019																	Tanjung Jabung Barat
				Jumlah Sengketa dalam Pemilu 2019																	Tanjung Jabung

																			Barat
		Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol	Persentase Parpol yang menyerahkan Pertanggung jawaban bantuan keuangan tepat waktu.	99,58%	12 Bulan	60,000,000	11 Rekomendasi Pencairan	60,000,000	11 Rekomendasi Pencairan	70,000,000	11 Rekomendasi Pencairan	70,000,000	11 Rekomendasi Pencairan	70,000,000	11 Rekomendasi Pencairan	157,500,000	11 Rekomendasi Pencairan	487,500,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		Pembinaan Politik asyarakat	Tingkat Pemahaman Masyarakat, Pelajar,Mahasiswa terhadap Budaya dan etika Politik	98%	75 Orang	70,000,000	40 Orang	31,000,000	40 Orang	40,000,000	40 Orang	40,000,000	80 Orang	100,000,000	80 Orang	105,000,000	40 Orang	386,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		Pemantauan Perkembangan Politik Daerah	Jumlah Pemantauan Perkembangan Politik di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	91,67%	0.00%	0	8 Dokumen Laporan	77,000,000	8 Dokumen Laporan	90,000,000	8 Dokumen Laporan	90,000,000	8 Dokumen Laporan	90,000,000	8 Dokumen Laporan	94,500,000	8 Dokumen Laporan	441,500,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		Pemantapan Persiapan Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020 di 13 Kecamatan	Jumlah Laporan persiapan Pemilu Kada di 13 Kecamatan	100%	0.00%	0	13 Kecamatan	350,000,000	13 Kecamatan	350,000,000	0.00%	0	13 Kecamatan	350,000,000	13 Kecamatan	367,500,000		1,417,500,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Jumlah Sosialisasi pemantapan Pilkada Provinsi dan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat																	Tanjung Jabung Barat
																				Tanjung Jabung Barat
			Indikator Sasaran 5 1. IndeksKepuasanMasyarakat 2. Nilai AKIP	**100.0%**	**100.0 %**	**388,400,000**	**100.0%**	**613,400,000**	**100.0 %**	**645,400,000**	**100%**	**647,400,000**	**100%**	**662,400,000**	**100 %**	**695,520,000**	**100 %**	**3,652,520,000**	**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat
SASARAN 5 Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja dan Keuangan		**PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Indikator Program** '- Rata- Rata IKM per triwulan - Persentase pemenuhan ' komponen SAKIP - Persentase penurunan temuan ' hasil pemeriksaan Inspektorat ' yang di tindak lanjuti																	Tanjung Jabung Barat
			Indikator Kinerja Kegiatan 'Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Aparatur																	Tanjung Jabung Barat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase peningkatan disiplin, ' kapasitas sumber daya Aparatur																	Tanjung Jabung Barat

			Tersedianya Materai Rp. 3000, Materai Rp.6000 dan Benda Pos Lainnya	100%	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	3,150,000	12 Bulan	18,150,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komonikasi,Sumer daya air dan Listrik	100%	12 Bln	60,000,000	12 Bln	65,000,000	12 Bln	65,000,000	12 Bln	65,000,000	12 Bln	65,000,000	12 Bln	68,250,000	12 Bulan	388,250,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat dan Peralatan Kebersihan Kantor	100%	12 Bln	8,000,000	12 Bln	11,000,000.00	12 Bln	11,000,000.00	12 Bln	11,000,000.00	12 Bln	11,000,000	12 Bln	11,550,000	12 Bulan	63,550,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	12 Bln	45,000,000.00	12 Bln	30,000,000	12 Bln	40,000,000	12 Bln	40,000,000	12 Bln	40,000,000	12 Bln	42,000,000	12 Bulan	237,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	12 Bln	11,000,000	12 Bln	15,000,000	12 Bln	15,000,000.00	12 Bln	17,000,000	12 Bln	17,000,000	12 Bln	17,850,000	12 Bulan	92,850,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Penerangan Tempat Kerja;	100%	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,150,000	12 Bulan	18,150,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan media cetak	100%	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,410,000	12 Bulan	25,410,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	100%	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,410,000	12 Bulan	25,410,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	Jumlah Frequensi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	100%	12 Bln	250,000,000	12 Bln	478,000,000	12 Bln	500,000,000	12 Bln	500,000,000	12 Bln	515,000,000	12 Bln	540,750,000	12 Bulan	2,783,750,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
																				Tanjung Jabung Barat
	SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Indikator Sasaran** **1. Indeks Kepuasan Masyarakat** **2. Nilai AKIP**	**100%**	**100%**	**265,000,000**	**100%**	**265,000,000**	**100%**	**265,000,000**	**100%**	**265,000,000**	**100%**	**290,000,000**	**100 %**	**425,000,000**	**100 %**	**1,775,000,000**	**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat

			Indikator Program **'- Rata- Rata IKM per triwulan** **- Persentase pemenuhan ' komponen SAKIP** **- Persentase penurunan temuan ' hasil pemeriksaan Inspektorat ' yang di tindak lanjuti**																	Tanjung Jabung Barat
			Indikator Kinerja Kegiatan **'- Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Aparatur** **- Persentase peningkatan disiplin, kapasitas sumber daya Aparatur**																	Tanjung Jabung Barat
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	1 Kali	60,000,000	1 Kali	60,000,000	1 Kali	60,000,000	1 Kali	60,000,000	1 Kali	60,000,000	1 Kali	60,000,000	100 %	360,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	1 Kali	50,000,000	1 Kali	50,000,000	1 Kali	50,000,000	1 Kali	50,000,000	1 Kali	50,000,000	1 Kali	50,000,000	100 %	300,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		Pemeliharaan Rutin Berkala /Gedung Kantor	Perbaikan Atap,/Lantai Dinding/Jendela dan pengecatan Gedung Kantor	100%	1 Kali	25,000,000	1 Kali	25,000,000	1 Kali	25,000,000	1 Kali	25,000,000	1 Kali	25,000,000	1 Kali	25,000,000	100 %	150,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan mendapatkan pemeliharaan secara rutin	100%	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	120,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	120,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	120,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	120,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	140,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	140,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	760,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	10,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	10,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	10,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	10,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	15,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	150,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	205,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
																				Tanjung Jabung Barat

			DISIPLIN APARATUR	**Indikator Sasaran** 1. IndeksKepuasanMasyarakat 2. Nilai AKIP	**100%**	**100%**	**17,000,000**	**100%**	**17,000,000**	**100%**	**17,000,000**	**100%**	**17,000,000**	**100%**	**17,000,000**	**100%**	**17,000,000**		**102,000,000**	**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat
				Inikator Kinerja Program - Rata- rata IKM per triwulan - Persentase pemenuha komponen SAKIP - Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang di tindak lanjuti																Tanjung Jabung Barat
				Indikator Kinerja Kegiata '- Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Aparatur - Persentase peningkatan disiplin, kapasitas sumber daya Aparatur																Tanjung Jabung Barat
			Pengadaan Pakaian DInas dan Perlengkapannya	Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat
				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas PNS/Non PNS	100%	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000		102,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
																					Tanjung Jabung Barat
			PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APRATUR	1. IndeksKepuasanMasyarakat 2. Nilai AKIP	**100%**	**100%**	**10,000,000**	**100%**	**0**	**100%**	**20,000,000**	**100%**	**20,000,000**	**100%**	**40,000,000**	**100%**	**42,000,000**	**100%**	**132,000,000**	**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat
				INDIKATOR KINERJA PROGRAM - Rata- rata IKM per triwulan - Persentase pemenuha komponen SAKIP - Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang di tindak lanjuti																Tanjung Jabung Barat
				Indikator Kinerja Kegiatan '- Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Aparatur - Persentase peningkatan disiplin, kapasitas sumber daya Aparatur																Tanjung Jabung Barat

			Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN ikut Bimtek,Diklat,Sosialisasi	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100 %**		**100 %**		**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat
				Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Diklat/Sosial	100%	2	10,000,000	0	0	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	40,000,000	8	42,000,000		132,000,000	KESBANG	
			PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Indikator Sasaran 1. IndeksKepuasanMasyarakat 2. Nilai AKIP	**100%**	**100%**	**40,000,000**	**100%**	**40,000,000**	**100%**	**40,000,000**	**100%**	**40,000,000**	**100%**	**50,000,000**	**100 %**	**50,000,000**	**100 %**	**260,000,000**	**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat
				Indikator Kinerja Program - Rata- rata IKM per triwulan - Persentase pemenuha komponen SAKIP - Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang di tindak lanjuti	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100 %**		**100 %**		**KESBANG**	Tanjung Jabung Barat
				Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan - Ranwal - Renja - Ranc.Akhir Renja - RKA - Jumlah penyampaian laporan kinerja dalam tahun berjalan - Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan dalam satu tahun																	Tanjung Jabung Barat
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan - Ranwal - Renja - Ranc.Akhir Renja - Jumlah penyampaian laporan kinerja dalam tahun berjalan - Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan dalam satu tahun	100%	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	25,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	25,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	130,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Penyusunan Dokumen dan Singkronisasi RKA dan Renja, Renstra OPD.Forum Lintas OPD.	Jenis Dokumen Renstra OPD, Forum Lintas OPD, RKA, Renja, Perjanjian Kinerja, Cascading	100%	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	25,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	25,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	130,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat

							1,232,530,00		2,578,400,00		2,852,400,00		2,384,400,00		3,114,400,00		3,743,770,00		15,905,900,00		

Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	Peningkatan kompentensi Pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas		**KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**	**Penanganan keamanan Lingkungan**		**90%**	**114,370,000**	**91%**	**202,625,000**	**92%**	**250,000,000**	**93%**	**250,000,000**	0%	**0.00**	0%	**0.00**	-	**816,995,000**	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Koordinasi Kegiatan Orang Asing LSM Asing dan lembaga asing di Daerah	Jumlah Dokumen hasil pendataan terhadap kunjungan dan kegiatan orang asing di 13 kecamatan	84,13%	12 Bulan	59,950,000	4 Dokumen	52,625,000	4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	100,000,000	0.00 %	**0.00**	0.00 %	**0.00**	12 Dokumen	312,575,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan penanganan kejadian konflik di Daerah	80%	12 Bulan	54,420,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000	0.00 %	**0.00**	0.00 %	**0.00**	12 Dokumen	504,420,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)				**120,000,000**		**150,000,000**		**150,000,000**		**150,000,000**		-		-		**570,000,000**	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Komunita Inteligen Daerah (KOMINDA)	Koordinasi dan Deteksi Dini antar unsur Inteligen dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	90	12 Bulan	120,000,000	13 Kecamatan dan 4 Dokumen Laporan	150,000,000	13 Kecamatan dan 4 Dokumen Laporan	150,000,000	13 Kecamatan dan 4 Dokumen Laporan	150,000,000	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	39 Kecamatan 12 Dokumen Laporan	570,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				-		**300,000,000**		**300,000,000**		**300,000,000**	-	-	-	-	-	900,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat

program pembangunan daearah, dan

4. Terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan Daerah. Secara rinci penetapan indikator kinerja program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 –2021 sebagaimana tabel Tabel T-C.28 berikut.

Tabel T-C.28
INDIKATOR KINERJA P PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016 - 2021

No	INDIKATOR	Tahun 0	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Rata- rata IKM per triwulan				80 %	80 %	80 %	
	- Persentase pemenuha komponen SAKIP				100%	100%	100%	
	- Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang di tindak lanjuti				100%	100%	100%	
	- Persentase realisasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan konflik sosial.				80 %			
	- Persentase Desa / Kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan peningkatan konflik sosial.				50%	50%	50%	

	- Jumlah Kecamatan yang termonitor keberadaan kegiatan orang asing di daerah.				85%	85%	85%	
	- Persentase cegah dini dan advokasi Rencana Aksi unjuk Rasa				85%	85%	85%	
	- Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinanaan antara Kerukunan Ummat Bergama				7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	
	- Jumlah Ormas yang mendaftarkan keberadaannya ke Badan Kesbangpol TJB.				30 Ormas	30 Ormas	30 Ormas	
	- Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan Ideologi bangsa dan bela Negara.				100 Peserta	100 Peserta	100 Peserta	
	- Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan terhadap tokoh masyarakat,Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda sebagai kader pembauran Kebangsaan.				6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	
	- Persentase partisipasi masayarakat dalam Pemilu				≥ 80 %	≥ 80 %		
	- Pilpres				≥ 80 %			
	- Pileg Pusat,				≥ 80 %			

	- Pileg Provisi				≥ 80 %			
	- Pileg Kabupaten				≥ 80 %			
	- Pileg DPD				≥ 80 %			
	- Pilkada				-	≥ 80 %		
	- Legitimasi (Keabsahan) hasil pemilu				≥ 80 %	≥ 80 %		

VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Prubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara khusus dan kondisi, situasi dan potensi yang ada di Provinsi Jambi pada umumnya.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021. Hasil pelaksanaan dari renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pemegan otonomi daerah dan pemerintah Provinsi Jambi sebagai perwakilan pemerintah pusat .

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT